

## II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kepemimpinan

#### 1. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan menurut Menurut Syafiee (2011: 39) pengertian kepemimpinan secara etimologi yaitu :

- a. Kepemimpinan memiliki kata dasar yaitu “Pimpin” yang dalam bahasa Inggris yaitu *lead* yang memiliki arti bimbing atau tuntun.
- b. Ketika kata dasar pimpin ditambah dengan awalan “pe” menjadi “Pemimpin” yang dalam bahasa Inggris yaitu *Leader* yang memiliki arti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.
- c. Apabila kata dasar tersebut diberi akhiran “an” menjadi “Pimpinan” merubah makna menjadi orang yang menjadi kepala di dalam suatu organisasi atau kelompok. Pemimpin dan Pimpinan memiliki perbedaan sifat, apabila Pemimpin (ketua) cenderung lebih demokratis sedangkan Pimpinan (Kepala) cenderung lebih otoriter.
- d. Setelah dilengkapi dengan menambah awalan “ke” dan diberi akhiran “an” menjadi “kepemimpinan” yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Leadership* yang memiliki arti kemampuan pribadi seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama sehingga demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.

Kepemimpinan menurut Kartono (2013: 6) yaitu:

Kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin, kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis antara pemimpin dan individu – individu yang dipimpin (ada relasi interpersonal). Kepemimpinan berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi, dan menggerakkan orang – orang lain guna melakukan sesuatu, demi pencapaian suatu tujuan.

Penjelasan mengenai Kepemimpinan menurut Stogdill dalam Kaloh (2010: 10)

setidaknya terdapat sebelas pengertian kepemimpinan yaitu :

- a. Kepemimpinan sebagai titik pusat proses – proses kelompok
- b. Kepemimpinan adalah suatu kepribadian yang mempunyai pengaruh
- c. Kepemimpinan adalah seni untuk menciptakan kesesuaian paham atau kesetiaan, kesepakatan
- d. Kepemimpinan adalah pelaksanaan pengaruh
- e. Kepemimpinan adalah tindakan atau perilaku
- f. Kepemimpinan adalah suatu bentuk persuasi
- g. Kepemimpinan adalah hubungan kekuatan/kekuasaan
- h. Kepemimpinan adalah sarana pencapaian tujuan
- i. Kepemimpinan adalah suatu hasil dari interaksi
- j. Kepemimpinan adalah peranan yang dipikirkan
- k. Kepemimpinan adalah inisiasi/permulaan dari struktur

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, pemimpin merupakan awal struktur atau pusat proses kelompok sehingga pemimpin harus dapat mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau ikut melaksanakan apa yang dilakukan oleh pemimpin untuk dapat mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan berfungsi sebagai penggerak agar suatu organisasi dapat berjalan sesuai dengan pencapaian tujuan bersama. Kepemimpinan belandaskan pada kemampuan seorang pemimpin untuk dapat mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan seorang pemimpin harus ditonjolkan untuk mengarahkan orang – orang yang dipimpinannya, dalam artian jiwa kepemimpinannya harus lebih menonjol agar dapat mengarahkan orang lain.

Melaksanakan kepemimpinan seorang pemimpin ada yang bersifat demokratis dan ada juga yang bersifat otoriter. Kepemimpinan Demokratis lebih menekankan pada aspek kerjasama antara bawahan dan atasan. Mereka bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah melalui perundingan ataupun melalui

musyawarah bersama sehingga menimbulkan gagasan – gagasan untuk menyelesaikan permasalahan.

Sedangkan kepemimpinan otoriter lebih menekankan pada aspek pemimpinnya saja, artinya seorang pemimpin tidak mau menerima masukan dari pihak lain. Pemimpin otoriter hanya menyelesaikan masalah dengan kemampuannya sendiri tanpa melakukan musyawarah kepada bawahannya sehingga penyelesaian masalahnya terkadang tidak cocok dengan apa yang ingin dicapai oleh organisasi.

Kedua sifat kepemimpinan diatas dapat disesuaikan dengan apa yang akan dikerjakan oleh suatu organisasi. Jika suatu permasalahan ingin diselesaikan dengan cepat atau membutuhkan waktu yang sedikit maka kepemimpinan yang cocok digunakan yaitu otoriter karena tidak melakukan musyawarah. Sedangkan jika suatu organisasi ingin mencapai pencapaian tujuan secara maksimal dilakukan secara musyawarah atau menggunakan sifat kepemimpinan demokratis.

Kepemimpinan memiliki indikator-indikator untuk melaksanakan suatu kepemimpinan yang baik, menurut Yukl dalam Ali (2012: 71) menyatakan 3 indikator kepemimpinan yaitu:

Dalam Kepemimpinan terdapat 3 indikator di dalamnya yaitu Pemimpin, Pengikut, dan Situasi.

- a. Pemimpin memiliki Indikator – ndikator di dalamnya yaitu Ciri (Motivasi, keberibadian, dan nilai), keyakinan dan optimisme, keterampilan dan keahlian, perilaku, integritasi dan etika, taktik penaruh dan sifat pengikut.
- b. Pengikut memiliki Indikator di dalamnya yaitu ciri (kebutuhan, nilai, konsep pribadi), keyakinan dan optimisme, keterampilan dan keahlian, sifat dari kepemimpinannya, kepercayaan pada pemimpin, dan puas kan pemimpin dan pekerjaannya

- c. Situasi memiliki indikator yaitu meliputi jenis urut organisasi, besarnya organisasi, posisi kekuasaan dan kewenangan, struktur dan kerumitan Tugas, kesalingtergantungan tugas, keadaan lingkungan yang tidak menentu, dan keberantungan eksternal.

Menurut Widjaja (2010: 31) tipe kepemimpinan yang demokratis dapat terwujud apabila menggunakan kisi-kisi sebagai berikut :

- a. Proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia.
- b. Selalu menyinkronkan dari tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi.
- c. Senang menerima saran, pendapat dan kritikan.
- d. Berusaha mengutamakan kerja sama dengan anggota tim kerja dalam usaha mencapai tujuan.
- e. Memberikan kebebasan kepada bawahan untuk mengembangkan diri.
- f. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin.

Kepemimpinan yang demokratis lebih menekankan pada kerjasama antara pemimpin dan bawahan dalam menentukan arah tujuan dari organisasi yang lebih baik. Pemimpin yang demokratis dalam mengambil setiap keputusan melibatkan bawahan agar mendapatkan ide atau gagasan yang lebih luas demi mencapai suatu tujuan bersama.

## **2. Tipe-Tipe Kepemimpinan**

Kepemimpinan memiliki beberapa tipe-tipe kepemimpinan dalam menjalankan kepemimpinannya, menurut Byrkjeflot dalam Ali (2012: 77) menyatakan bahwa setidaknya terdapat enam tipe kepemimpinan yang menjadi acuan seorang pemimpin yaitu:

- a. Kepemimpinan Tradisional, yaitu suatu kepemimpinan apabila pemimpin suatu organisasi atau institusi ditunjuk dari atas, oleh Raja, atau Ratu atau Tuhan.
- b. Kepemimpinan Birokratik, yaitu didasarkan pada hukum dan aturan – aturan yang dibangun dari keinginan atau aspirasi kolektif bersama – sama

- dengan jajaran kerja organisasi formal serta kantor, dimana pemimpin itu bertugas.
- c. Kepemimpinan Awam, yaitu pemimpin mewakili kepentingan rakyat dan merakyat.
  - d. Kepemimpinan berbasis Ilmu Pengetahuan, yaitu kepemimpinan yang menekankan pada pembuatan kebijakan berbasis fakta dan data atau bukti.
  - e. Kepemimpinan berbasis Negosiasi, yaitu pemimpin yang memiliki kemampuan strategik dengan *sense of asserting* dan *sense of promoting*.
  - f. Kepemimpinan Profesional, yaitu pemimpin yang lebih memiliki tingkat edukasi tertinggi dan berpengalaman berada di dalam organisasi – organisasi, serta dapat mendorong aksi – aksi solidaritas sesuai dengan tujuan organisasi.

Berdasarkan penelitian ini, tipe kepemimpinan yang sesuai yaitu Tipe Kepemimpinan Awam dan Tipe Kepemimpinan Profesional. Dimana seorang pemimpin dalam kepemimpinan awam harus berpihak kepada masyarakat bukan berpihak kepada siapa pun ataupun kepada dirinya sendiri. Kepemimpinan awam lebih kearah kepentingan rakyat merupakan kepentingan dari apapun untuk menuju kearah sejahtera.

Sedangkan Tipe Kepemimpinan Profesional cocok dengan penelitian ini dikarenakan seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan untuk memajukan suatu organisasinya, serta harus memiliki pengalaman untuk dapat menjadikan organisasi tersebut lebih maju. Memiliki pendidikan yang tinggi seorang pemimpin dapat menyelesaikan masalah dengan baik serta mereka dapat menerapkan teori-teori untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan permasalahannya.

Kepemimpinan yang mengacu pada kedua hal tersebut, maka peneliti yakin dapat membantu seorang pemimpin untuk menuju kearah yang lebih baik lagi. Menjadikan organisasi menjadi kearah yang lebih baik lagi.

### 3. Pemimpin Formal dan Pemimpin Informal

Setiap organisasi atau kelompok selalu memiliki keterkaitan dengan pemimpin karena suatu organisasi tanpa adanya pemimpin maka organisasi tersebut tidak akan mencapai suatu tujuan, dimana seorang pemimpin itu sendiri merupakan orang yang menjadi tumpuan bagi organisasi atau kelompok. Setidaknya terdapat dua macam pemimpin sesuai dengan terpilihnya seorang pemimpin yaitu Pemimpin Formal dan Pemimpin Informal, berikut dijelaskan oleh Kartono (2013: 11) Pemimpin Formal dan Pemimpin Informal yaitu :

#### a. Pemimpin Formal

Pemimpin formal yaitu orang yang oleh organisasi/lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya, untuk mencapai sasaran organisasi. Berikut merupakan ciri – ciri Pemimpin Formal yaitu :

1. Berstatus sebagai pemimpin formal selama masa jabatan tertentu, atas dasar legalitas formal oleh penunjukkan pihak yang berwenang
2. Sebelum pengangkatannya, dia harus memenuhi beberapa persyaratan formal terlebih dahulu
3. Ia diberi dukungan oleh organisasi formal untuk menjalankan tugas kewajibannya karena itu dia selalu memiliki atasan/superior.
4. Dia mendapatkan balas jasa materiil dan immateriil tertentu serta emolumen (keuntungan ekstra, penghasilan sampingan)
5. Dia bisa mencapai promosi atau kenaikan pangkat formal, dan dapat dimutasikan
6. Apabila dia melakukan kesalahan – kesalahan, dia akan dikenai sanksi dan hukuman
7. Selama menjabat kepemimpinan, dia diberi kekuasaan dan wewenang, antara lain untuk; menentukan *policy*, memberikan motivasi kerja kepada bawahan, menggariskan pedoman dan petunjuk, mengalokasikan jabatan dan penempatan bawahannya, melakukan komunikasi.

#### b. Pemimpin Informal

Pemimpin informal yaitu orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia, memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Berikut merupakan ciri – ciri pemimpin Informal yaitu

1. Tidak memiliki penunjukkan formal atau legitimasi sebagai pemimpin
2. Kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya, dan mengakuinya sebagai pemimpin. status kepemimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerima pribadinya.

3. Dia tidak mendapatkan dukungan dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya.
4. Biasanya tidak mendapatkan imbalan balas jasa, atau imbalan jasa itu diberikan secara sukarela
5. Tidak dapat dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi, dan tidak memiliki atasan. Dia tidak perlu memenuhi persyaratan formal tertentu.
6. Apabila dia melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum, hanya saja respek dari masyarakat menjadi berkurang, pribadinya tidak diakui, dan dia ditinggalkan oleh massanya.

Berdasarkan uraian diatas mengenai Kepemimpinan Formal dan Kepemimpinan Informal, dalam penelitian ini kepemimpinan yang dimaksud masuk kedalam kepemimpinan formal, karena berdasarkan pendapat Kartono bahwa kepemimpinan formal didasarkan pada legalitas, pengangkatannya berdasarkan pada hukum. Selain itu kepemimpinan formal diberikan jasa berupa materiil dan imateriil dalam artian mereka mendapatkan gaji selama menjabat menjadi pemimpin, untuk menunjang kinerja pemimpin itu sendiri.

Kepemimpinan formal juga lebih menekankan pada adanya dukungan dari organisasi formal lainnya untuk menjalankan tugas dan kewajibannya, artinya kepemimpinan formal di naungi oleh organisasi lain. Kepemimpinan formal memiliki atasan untuk menaungi serta membimbing kearah yang lebih baik lagi. Kepemimpinan formal pengangkatannya melalui pelantikan berdasarkan asas legalitas itu sendiri.

Penelitian ini meneliti mengenai kepala desa yang mana seorang kepala desa sesuai dengan pemimpin formal mendapatkan imbalan materiil dan imateriil berupa gaji. Kepala desa diberikan imbalan gaji selama satu bulan sekali. Selain itu kepala desa diangkat melalui pelantikan yang dilakukan oleh camat dan bupati, ketika ia memimpin suatu desa maka ia bertanggung jawab kepada

camat sebagai perpanjangan tangan dari bupati. Penjelasan mengenai pemimpin formal dapat disimpulkan bahwa kepala desa merupakan pemimpin formal sesuai dengan yang dikemukakan oleh pendapat Kartono.

## **B. Kepala Desa**

Pemerintahan merupakan suatu sistem yang bekerja untuk mengatur dan mengurus kehidupan negara. Pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahkan terdapat pemerintahan terkecil yaitu pemerintahan desa. Desa memiliki wewenang dalam menjalankan otonominya sendiri. Desa dianggap dapat mengurus urusannya sendiri baik dalam pembuatan kebijakan ataupun dalam pembuatan peraturan.

Desa dipimpin oleh kepala desa yang merupakan struktur tertinggi di dalam struktur desa. kepala desa memiliki hak penuh atas apa yang terjadi kepada desa tersebut. Kepala desa dipilih melalui rakyat dan oleh rakyat. Lama waktu penjabatan kepala desa yaitu lima tahun disetiap periodenya.

Untuk menjadi kepala desa harus dapat memenuhi kriteria sebagai berikut Menurut PP No. 72 tahun 2005 pasal 44 dalam Soemantri (2010: 252) menyatakan bahwa:

Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;



- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- f. penduduk desa setempat;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
- j. memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Berdasarkan dari uraian tersebut jika seseorang ingin menjadi kepala desa haruslah memenuhi kriteria di atas seperti seorang kepala desa harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kepala desa harus berpegang teguh pada nilai – nilai agama atau keyakinan yang berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa. Kepala desa harus setia kepada Pancasila berpegang pada keyakinan Pancasila itu sendiri sebagai pedoman dalam memimpin.

Seorang kepala desa harus sudah melaksanakan pendidikan setidaknya tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan harus sudah berumur 25 tahun artinya seorang kepala desa sudah mampu untuk berfikir kearah kedewasaan demi untuk kemajuan desa yang di Pimpinnya. Seorang kepala desa harus merupakan warga desa yang tinggal di desa yang akan dipimpinnya serta calon kepala desa harus bersedia menjadi kepala desa tanpa ada paksaan dari pihak luar, artinya seorang kepala desa mau mencalonkan tanpa ada paksaan dari pihak luar.

Kepala desa tidak terjerat kasus hukum paling lama 5 tahun, apabila seorang kepala desa sudah terjerat kasus maka akan membahayakan desa tersebut karena ia tidak bisa menjadi panutan para warganya. Terakhir seorang kepala desa tidak boleh mencalonkan diri jika ia pernah menjadi kepala desa dalam waktu 2 dekade

karena akan berdampak pada tindakan nepotisme. Dari uraian tersebut jika seorang calon kepala desa telah memenuhi syarat pada PP No. 72 tahun 2005 pasal 44, maka ia berhak ikut dalam Pilkada untuk maju menjadi kepala desa.

Berikut merupakan penjelasan mengenai kepemimpinan kepala desa menurut Widjaja (2010: 31) yaitu:

Kepemimpinan Kepala Desa pada dasarnya bagaimana Kepala Desa dapat mengkoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Kepala desa menyadari bahwa pekerjaan tersebut bukanlah tanggung jawab kepala desa saja. Oleh sebab itu, ia melimpahkan semua wewenangnya kepada semua tingkat pimpinan sampai ke tingkat bawah sekalipun seperti kepala dusun dan lainnya.

Berdasarkan pendapat diatas Kepala desa akan berhasil dalam menjalankan kepemimpinannya apabila memperhatikan suara rakyat yang dipimpin secara Demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat. Kepala desa harus melakukan kerjasama dengan semua tingkat pimpinan sampai ke tingkat bawahan agar apa yang akan dilakukan oleh kepala desa untuk mewujudkan kemajuan desa tersebut dapat tercapai. Kepala desa akan terbantu apabila menggunakan teori diatas dalam melakukan tugas – tugasnya karena semua tingkat pimpinan yang ada di desa akan melakukan tugas – tugas sesuai dengan kemampuan mereka masing – masing.

## C. Kepemimpinan Berbasis Pancasila

### 1. Pancasila

Pancasila dapat didefinisikan menurut Syarbaini (2009: 25) menyatakan bahwa:

Pancasila adalah suatu pandangan hidup atau ideologi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, antarmanusia, manusia dengan masyarakat atau bangsanya, dan manusia dengan alam lingkungannya. Alasan yang prinsipal mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup dengan fungsinya tersebut diatas adalah :

- a. Mengakui adanya kekuatan gaib yang ada di luar diri manusia menjadi pencipta serta mengatur penguasa alam semesta.
- b. Keseimbangan dalam hubungan, keserasian – keserasian dan untuk menciptakannya perlu pengendalian diri.
- c. Dalam mengatur hubungan, peranan dan kedudukan bangsa sangat penting. Persatuan dan kesatuan sebagai bangsa merupakan nilai sentral.
- d. Kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan, serta musyawarah untuk mufakat dijadikan sendi kehidupan bangsa.
- e. Kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bersama.

Berdasarkan uraian diatas, Pancasila menjadi acuan atau pandangan hidup yang mengatur hubungan baik hubungan manusia dengan Tuhan ataupun hubungan manusia dengan manusia. Hubungan dengan Tuhan yang dimaksud dalam pendapat di atas yaitu seseorang yang hidup dalam negara Indonesia yang berlandaskan Ideologi Pancasila harus percaya akan adanya Tuhan, dengan percaya pada tuhan maka seseorang dapat dinilai berakhlak. Seseorang harus memiliki hubungan dengan Tuhan dalam artian setiap individu yang berada di Negara Indonesia harus memiliki suatu agama untuk menjalin hubungan antara manusia dengan Tuhan.

Sedangkan hubungan manusia dengan manusia yang dimaksud yaitu, setiap individu yang tinggal di Negara Indonesia yang berlandaskan Ideologi

Pancasila harus mampu menjalin hubungan baik dengan cara adil pada setiap individu lain. Tidak membeda-bedakan perlakuan semua dianggap sama demi pencapaian suatu kesejahteraan bersama. Apabila masyarakat berhubungan baik dengan masyarakat lain maka kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan dapat tercapai dengan sendirinya. Alat untuk menjalin hubungan yang baik antarmanusia yaitu dengan menggunakan media gotong royong, manusia harus saling membantu antarmanusia lain. Jika ada individu yang membutuhkan bantuan, individu lain harus sigap untuk membantu agar terjalin hubungan yang erat.

Melihat hal tersebut, pandangan hidup yang tepat untuk mencapai tujuan bersama ke arah yang lebih baik dapat menggunakan prinsip Pancasila sebagai dasar Ideologi bangsa. Pancasila lebih menekankan pada kaidah hubungan baik manusia dengan Tuhan ataupun hubungan manusia dengan manusia.

Pengertian Pancasila sebagai nilai yang fundamental menurut Syarbaini (2009: 38) adalah Seperangkat nilai yang terpadu berkenaan dengan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945, maka pada hakikatnya nilai-nilai

Pancasila tersebut adalah :

- a. Pokok pikiran pertama, negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara mengatasi segala golongan dan perseorangan. Hal ini merupakan penjabaran dari sila ketiga.
- b. Pokok pikiran kedua, menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini penjabaran dari sila kelima.

- c. Pokok pikiran ketiga, menyatakan negara berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pokok pikiran ini menunjukkan negara Indonesia negara Demokrasi, yaitu kedaulatan di tangan rakyat sesuai dengan sila keempat.
- d. Pokok pikiran keempat, menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran dari sila pertama dan kedua.

Berdasarkan uraian di atas, UUD 1945 mencerminkan mengenai nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri pada tiap-tiap sila. Nilai yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu nilai yang sudah dijelaskan pada pokok pikiran pertama dan pokok pikiran kedua.

Pokok pikiran yang pertama yaitu harus adanya perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan ini ditujukan pada masyarakat yang merasa terancam kehidupannya, baik itu terancam dalam kehidupan sosial ataupun perlakuan dari orang lain yang merugikan suatu kelompok atau individu. Seperti contoh apabila terdapat masyarakat yang merasa selalu mendapat perlakuan tidak baik dari masyarakat lain, ia berhak mengadukan pada instansi terkait atau pemerintah agar mendapat perlindungan. Di sini peran dari individu yang berwenang, wajib untuk melakukan perlindungan bagi individu-individu yang merasa tidak nyaman dalam kehidupannya.

Pokok pikiran kedua, yaitu mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Perlindungan bukan hanya dilakukan pada masyarakat menengah keatas akan tetapi harus mencakup semua agar mendapatkan nilai keadilan yang sesungguhnya, contohnya jika seseorang yang mencuri ayam dapat dipidanakan dengan kurungan selama tiga bulan

maka orang yang melakukan tindak korupsi harus dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih. Keadilan itu belum tentu dikatakan sama akan tetapi keadilan akan terwujud apabila perlakuan ringan dihukum ringan dan perlakuan berat dihukum berat. Selain keadilan juga terdapat kesejahteraan umum, hal ini berkenaan pada masyarakat yang masih memiliki ketidaksejahteraan. Disini negara harus mampu muncul untuk mengatasi masalah ketidaksejahteraan agar masyarakat merasakan hal yang lebih baik lagi.

Dari uraian pokok pikiran pertama dan kedua, seseorang yang berpengaruh harus mengacu pada nilai-nilai luhur pancasila yang terkandung.

## **2. Kepemimpinan Berbasis Pancasila**

Kepemimpinan Pancasila menurut Kartono (2013: 318) adalah bentuk kepemimpinan yang selalu menyumberkan diri pada nilai-nilai luhur dari norma-norma Pancasila. Semangat kepemimpinan Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai luhur dapat dipadukan dengan nilai-nilai modernisasi yang positif. Agar mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, seorang pemimpin harus memiliki kewibawaan serta harus memiliki kelebihan yang tidak dapat ditonjolkan oleh pribadi lain, berikut merupakan kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin menurut Kartono (2013:313) yaitu :

1. Sehat jasmaninya, Pemimpin harus memiliki kesehatan yang baik dalam dirinya serta harus memiliki keuletan.
2. Memiliki integritas kepribadian, sehingga dia matang, dewasa, bertanggung jawab, dan susila
3. Rela bekerja atas dasar pengabdian dan prinsip kebaikan, serta loyal terhadap kelompoknya

4. Memiliki inteligensi tinggi untuk menanggapi situasi dan kondisi dengan cermat, efisien-efektif, memiliki kemampuan persuasi, dan mampu memberikan motivasi yang baik kepada bawahan
5. Mampu menilai dan membedakan aspek yang positif dari yang negatif dari setiap pribadi dan situasi, agar mendapatkan cara yang paling efisien untuk bertindak.

Seorang pemimpin yang baik harus mau untuk bekerja keras untuk kemajuan kelompoknya. Serta yang terakhir seorang pemimpin harus memiliki kepandaian untuk menyelesaikan suatu masalah, dengan pengetahuannya yang luas diharapkan pemimpin dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam organisasinya. Pemimpin yang mengacu pada hal tersebut akan menjadi pemimpin yang benar-benar baik untuk memimpin organisasi.

Kepemimpinan harus berdasarkan pada nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh negara, salah satu nilai luhur yang dimiliki negara adalah Pancasila. Kepemimpinan harus berlandaskan dengan Pancasila, dengan mengamalkan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila diharapkan seorang pemimpin dapat menjadi Pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila.

Nilai-nilai kepemimpinan di bumi Indonesia memiliki sebelas asas, yang mana kesebelas asas tersebut dapat diterapkan pada setiap sektor. Dari keseluruhan asas tersebut hanya tiga asas pertama yang ditonjolkan oleh Ki Hajar Dewantoro, dan pada akhirnya dijadikan prinsip utama kepemimpinan Pancasila. Kesebelas asas tersebut tercantum dalam Kartono (2013: 319) yaitu:

1. Hing Ngarsa Sung Tulada  
Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berani menjadi ujung tombak bagi masyarakatnya. Sebagai pemimpin yang berdiri didepan ia harus memiliki sifat – sifat teguh, tanggon dan tanggung. Teguh artinya berani menghadapi bahaya karena ia menjadi pengayom, *Tanggon* artinya

besar kemauannya dalam menanggulangi bahaya, dan *Tanggung* artinya berani bertanggung jawab walaupun mengalami banyak kesulitan.

2. **Hing Madya Mangun Karsa**  
Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau terjun langsung di tengah – tengah masyarakat. Merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, sanggup menggugah dan membangkitkan gairah serta motivasi kerja. Pemimpin yang seperti ini memiliki kesentosaan hati, cepat tanggap dalam mengambil keputusan karena ia merasakan apa yang dirasakan bawahannya.
3. **Tut Wuri Handayani**  
Seorang pemimpin berdiri di belakang pengikutnya dalam artian seorang pemimpin harus mampu mendorong pengikutnya agar pengikutnya mau berprakasa, berani berinisiatif, dan memiliki kepercayaan diri untuk berkarya dan berpartisipasi dan tidak tergantung pada perintah atasan saja.
4. **Ketuhanan Yang Maha Esa**  
Seorang pemimpin, dituntut agar memiliki keyakinan beragama, keimanan, dan ketakwaan yang teguh terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan kepada Tuhan akan membuat kalbu dan hati menjadi bersih dan suci lahir dan batin.
5. **Waspada Purba Wisesa**  
Waspada artinya seorang pemimpin harus memiliki pandangan kedepan untuk meramal akan bagaimana keadaan organisasinya, sedang “*murba*” atau purba artinya mampu menguasai, *wasesa* artinya keunggulan, kelebihan. Jadi *purba wasesa* yaitu mampu menciptakan dan mengendalikan semua kelebihan dan kekuasaan. Berdasarkan sifat – sifat unggul tersebut pemimpin harus mampu mengurus setiap persoalan yang berkembang.
6. **Ambeg Pramarta**  
*Ambeg* artinya mempunyai sifat – sifat. *Pramarta* artinya yang benar, yang hakiki. Maka *ambeg pramarta* yaitu murah, baik hati. Seseorang yang memiliki *ambeg pramarta* dalam hidupnya selalu memiliki sikap adil yang mana mendahulukan yang harus didahulukan.
7. **Prasaja**  
Pemimpin bersifat sederhana, terus terang, blak – blakan, tulus, lurus, ikhlas, dan toleran. Pemimpin tidak memiliki sifat gambar gembor selalu terus terang apa adanya.
8. **Satya**  
Pemimpin yang memiliki satya adalah pemimpin yang memiliki kesetiaan, menepati janji, dan selalu memenuhi segala ucapannya. Pemimpin yang memiliki satya biasanya merupakan pemimpin yang jujur dan setia, cermat, tepat dan selalu loyal terhadap kelompoknya. Pemimpin ini selalu memberikan yang terbaik kepada pengikutnya.
9. **Gemi Nastiti**  
Pemimpin harus memiliki sifat hemat cermat, dalam artian seorang pemimpin bekerja dengan efektif dan efisien. Seorang pemimpin yang *gemi nastiti* juga memiliki kesadaran untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran apa saja untuk keperluan yang benar – benar penting.
10. **Blaka (terbuka, jujur, lurus)**  
Pemimpin yang baik harus bersifat terbuka, komunikatif, tidak picik pandangan. Pemimpin ini mau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan pendapatnya, kritik atau koreksi. Pemimpin seperti ini tidak boleh malu dalam belajar untuk menyesuaikan lingkungannya. Pemimpin yang baik menyadari bahwa tidak ada kesempurnaan yang



dimiliki oleh setiap makhluk oleh karena itu dia membuka diri untuk terus belajar dan melakukan transendensi diri.

11. Legawa

*Legawa* artinya tulus ikhlas, seorang pemimpin berani mengorbankan diri demi pengikutnya. Ketika seorang pemimpin mendapat cemooh dari pihak luar, seorang pemimpin harus mampu menerima dengan ikhlas dan memperbaiki kesalahan yang diungkapkan pengikutnya tanpa merasa sakit hati.

Berdasarkan uraian diatas, kepemimpinan yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada kesebelas asas tersebut. Jika kesebelas asas tersebut dimiliki oleh seorang pemimpin maka masyarakat akan merasakan kesejahteraan karena pemimpin tidak hanya memikirkan dirinya sendiri akan tetapi pemimpin lebih mementingkan para pengikutnya.

Pemimpin yang seperti disebut pada kesebelas asas diatas, memiliki sifat harus mengerti kemana organisasi akan berjalan. Mampu melihat kedepan nasib dari organisasi. Cermat dalam melakukan setiap pekerjaan. Mau mendengarkan aspirasi rakyat. Bertindak jujur tidak menyeleweng dari kaidah tertentu. Taat kepada agama serta seorang pemimpin harus berani untuk terbuka dan menanggung segala macam bentuk akibat yang berdampak pada organisasinya.

Sifat-sifat utama lainnya yang dijadikan pedoman bagi setiap pemimpin yang tertera pada uraian *Hashtabrata* (delapan tangan atau *laku wolung warni* atau delapan pegangan, perilaku) dalam Kartono (2013: 323) ialah:

1. Bagaikan Surya
2. Bagaikan candara atau rembulan
3. Bagaikan kartika atau bintang
4. Bagaikan mega atau awan
5. Bagaikan bumi
6. Bagaikan samudera
7. Bagaikan hagni atau api
8. Bagaikan bayu atau air

Delapan laku atau *Hasthabarata* ini dibarengi delapan karya atau *Hasthakarya* yang harus tekun dilakukan oleh pemimpin yaitu :

- a. Transendensi, yaitu meningkatkan derajat dan martabat manusia, dan menaikkan taraf kehidupan menjadi lebih makmur, adil dan maju. Transendensi menjadi dasar dari humanisasi dan liberasi. Hal ini dapat memberi arah kemana dan untuk tujuan apa humanisasi dan liberasi itu dilakukan, serta dalam ilmu sosial profetik di samping berfungsi sebagai dasar nilai bagi praksis humanisasi dan liberasi, juga berfungsi sebagai kritik.

Dengan kritik akan mengarah kepada kemajuan teknik dapat di arahkan untuk mengabdikan pada perkembangan manusia dan kemanusiaan, bukan pada kehancuran, tetapi melalui kritik masyarakat yang akan di bebaskan dari kesadaran materialistik. Di mana posisi ekonomi seseorang menentukan kesadarannya menuju kesadaran transendental.

- b. Keteladanan berasal dari kata teladan yang bermakna “sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh”. Dengan demikian, keteladanan berarti hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Keteladanan adalah cara memimpin yang paling efektif. Metode membimbing yang paling tidak diragukan lagi kekuatannya.

Keteladanan adalah cara memimpin yang paling efektif. Metode membimbing yang paling tidak diragukan lagi kekuatannya. Allah meminta umat Islam agar meneladani perilaku Rasulullah (QS Al Ahzab 33:21). Perintah Al Quran ini secara tersirat dapat juga dimaknai bahwa cara memimpin yang baik dan efektif adalah dengan cara memberi keteladanan,

bukan hanya perkataan. Di ayat lain Al Quran juga mengingatkan, bahwa pemimpin yang ideal dan sukses selalu berusaha menyelaraskan perkataan dengan perbuatannya (QS As Shaf 61:3).

(<http://hilmi-izza.blogspot.com/2012/07/keteladanan-berasal-dari-kata-telad.html>, Tanggal: 28/02/2014, pukul: 22.00 WIB)

Berdasarkan uraian di atas, seorang pemimpin harus memiliki keteladanan untuk menjadi contoh yang baik kepada masyarakat agar masyarakat tidak akan salah dalam melangkah. Seorang pemimpin harus bertindak melakukan perbuatan serta perkataan tidak mengarah pada hal negatif.

- c. Sekuritas, memberikan perlindungan dan pengayoman, agar semua orang merasa aman dan tentram, memberantas segala hambatan, kerusuhan dan bencana.
- d. Inovasi, mampu menciptakan hal-hal baru, berjiwa pembaharuan.
- e. Realisasi adalah tindakan yang nyata atau adanya pergerakan/perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan. Realisasi, mampu membuktikan secara konkret/merealisasi ide-ide dan ucapan dalam karya-karya nyata, memungkinkan terjadinya hal-hal yang semula dianggap “mokal” atau tidak mungkin terjadi.
- f. Berencana, sanggup merencanakan secara cermat konsep-konsep dan karya baru untuk dikerjakan bersama-sama dengan rakyat/kaula alit secara kolektif.
- g. Dinamis, berjiwa kreatif dan rekonstruktif, memiliki daya kekuatan untuk merancang dan membuat karya – karya pembaruan.

- h. Pembajaan Tekad, punya “greget” atau gairah semangat kemauan untuk makarya, melakukan tugas kemanusiaan dan kerja membangun, guna mencapai keluhuran bangsa dan negara.

## **D. Sertifikasi Tanah**

### **1. Pengertian Sertifikasi Tanah**

Sertifikasi tanah atau hak atas tanah menurut Hayton dalam Sutedi (2012: 1) adalah pengakuan hak-hak atas tanah seseorang yang diatur dalam Undang-Undang Pendaftaran Tanah. Di Indonesia, sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kekuatan berlakunya sertifikat sangat penting menurut Sutedi (2012: 2) karena sebagai berikut:

- a. Sertifikat memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi orang yang namanya tercantum dalam sertifikat.
- b. Pemberian sertifikat dimaksudkan untuk mencegah sengketa kepemilikan tanah.
- c. Kepemilikan sertifikat, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan undang – undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Berdasarkan penelitian ini, warga transmigrasi harus memiliki sertifikat tanah untuk mendapatkan kesejahteraan. Kepemilikan sertifikat tanah akan berdampak pada kehidupan masyarakat, masyarakat akan merasa aman tentram dan menghindarkan masyarakat dari konflik atau dari sengketa tanah yang sering terjadi di Indonesia. Kepemilikan sertifikat akan menjadikan warga

memiliki hak atas tanah tersebut, baik tanah tersebut akan dikelola ataupun akan dijual karena telah memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi sertifikat tanah amat sangat penting bagi kehidupan warga transmigrasi agar tanah yang mereka miliki kuat secara hukum.

## **2. Fungsi Sertifikasi Tanah**

Sertifikasi tanah memiliki setidaknya 3 fungsi menurut Sutedi (2012: 57) antara lain fungsi dari sertifikasi tanah yaitu:

- a. Sertifikasi hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat di mata hukum.
- b. Sertifikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank/kreditor untuk memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya.
- c. Bagi pemerintah, kepemilikan sertifikasi tanah juga sangat menguntungkan walaupun kegunaan itu kebanyakan tidak langsung.

Berdasarkan penelitian ini, Sertifikat sangat berarti bagi warga transmigrasi. Pertama dengan adanya sertifikat tanah, masyarakat memiliki kekuatan hukum atas tanah yang ia miliki, tidak akan ada gugatan dari pihak luar ketika memiliki sertifikat tanah. Fungsi kedua, apabila masyarakat memiliki masalah dengan keuangan maka mereka mampu untuk menggadaikan tanah mereka pada pihak bank, yang dapat memberikan modal bagi usaha atau keperluan lain yang mendesak para warga. Fungsi ketiga artinya, pemerintah akan mudah mencatatkan kepemilikan tanah di badan pemerintahan yang terkait, dengan adanya catatan mengenai hak tanah maka ketika akan dibangun jalan atau dibangun keperluan umum akan mudah pemerintah mengelolanya.

## **3. Penerbitan Sertifikasi Tanah Secara Massal**

Penerbitan sertifikasi tanah dapat dilakukan secara massal melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Prona ini ditujukan pada orang-orang yang berpenghasilan rendah, dalam program Prona tidak memerlukan biaya yang cukup tinggi karena pembuatannya secara massal atau bersama-sama. Tujuan dari Prona itu sendiri dalam Sutedi (2012:66) yaitu

- a. Memberikan rangsangan kepada masyarakat khususnya pemegang hak atas tanah, untuk bersedia membuat sertifikat.
- b. Menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan
- c. Membantu pemerintah dalam hal menciptakan suatu suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.
- d. Menumbuhkan partisipasi masyarakat, khususnya pemilik tanah dalam menciptakan stabilitas politik serta pembangunan dibidang ekonomi.
- e. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan turut membantu pemerintah dalam menyelesaikan sengketa – sengketa pertanahan.
- f. Memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah
- g. Membiasakan masyarakat pemilik tanah untuk mempunyai alat bukti autentik atas haknya.

Pemerintah telah menentukan objek persertifikatan tanah di dalam Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), berikut objek yang dituju dalam prona menurut sutedi (2012: 76) yaitu

- a. Diutamakan desa – desa yang sudah ada peta – peta situasinya, misalnya: a) sudah ada peta – peta potret; b) sudah ada peta – peta yang dibuat berdasarkan desa demi desa; c) sudah ada peta – peta situasi dalam rangka pembuatan sertifikat secara rutin yang bersifat ngeblok.
- b. Apabila di situasi kabupaten belum ada desa yang mempunyai peta situasi berdasarkan pengukuran desa demi desa dipilih desa atau daerah yang telah mempunyai peta dari instansi lain atau peta – peta lain yang akan memudahkan gambar situasi.
- c. Menghindari daerah yang terlalu banyak sengketa yang tidak mungkin diselesaikan secara segera.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 226 tahun 1982 dala Sutedi (2012:75) seseorang dapat diberikan sertifikat dalam Prona ini dengan syarat:

- a. Tanah perumahan, luasnya maksimum 1.000 m<sup>2</sup> di daerah pedesaan.
- b. Tanah pertanian, tanah yang dimiliki maksimum 2 ha di daerah pedesaan.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti beranggapan bahwa Prona merupakan program yang penting untuk pendaftaran tanah dimana, jumlah dari warga transmigrasi yaitu 25 KK dapat mendaftarkan tanah melalui program Prona. Keuntungan dari Prona itu sendiri menggunakan biaya yang relatif terjangkau, serta memberikan kekuatan hukum ketika sertifikat itu telah jadi. Penggunaan program Prona juga sangat cocok untuk mendukung pembuatan sertifikat tanah masyarakat transmigrasi karena objek dari pronas itu sendiri terletak pada desa, serta tanah yang dimiliki oleh warga merupakan tanah yang tidak bersengketa secara serius.

Desa memberikan tanah kepada masyarakat transmigrasi untuk perumahan yaitu seluas dari 1.250 m<sup>2</sup>, Artinya tanah yang diberikan oleh desa seluas itu tidak dapat dimasukkan dalam kategori Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) sehingga tidak dapat diterbitkan secara massal. Sedangkan tanah yang digunakan untuk pertanian oleh masyarakat hanya seluas 1 ha, dengan kata lain warga transmigrasi dapat melakukan Prona secara massal untuk mengeluarkan sertifikat untuk menguatkan secara hukum atas tanah yang mereka miliki.

Pendaftaran tanah melalui Prona, dilakukan dengan cara pemohon mendaftarkan tanahnya pada kantor desa dan selanjutnya petugas pendaftaran tanah yang akan mengurusnya. Sertifikat tanah yang dimaksud memuat a) Nomor persil; b) Luas tanah; c) Letak tanah; d) Macam hak atas tanah; e) Surat keputusan pemberian hak; f) Nomor dan tanggal surat ukur; g) Nomor pemilik; h) Gambar bagian situasi.

Terhadap objek-objek tanah yang ternyata masih merupakan sengketa di dalam penyelenggaraan Prona maka terlebih dahulu harus diselesaikan ditingkat daerah, jika permasalahan tidak bisa diselesaikan oleh daerah maka diteruskan ke tingkat Pusat untuk mendapatkan pemecahannya. Apabila tanah-tanah objek pronas yang masih berupa sengketa, dan tidak bisa diselesaikan oleh pihak-pihak agraria, maka dikeluarkan dari objek pronas sertifikat massal ini.

#### **E. Kerangka Pikir**

Berdasarkan penelitian ini, penulis mencoba untuk menjelaskan mengenai kepemimpinan yang dimaksud dalam penelitian ini sesungguhnya yaitu tindakan atau perilaku dalam memimpin suatu kelompok. Dimana harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain mau ikut dengan apa yang diperintahkan oleh seorang pemimpin. Kepemimpinan menjadi nilai kemajuan dalam suatu kelompok, jika suatu kelompok tidak memiliki seorang pemimpin maka kelompok tersebut akan tidak dapat bertahan lama karena tidak adanya orang yang mengatur suatu kelompok. Apabila tidak ada pengaturan dalam suatu kelompok maka kelompok tersebut tidak akan berkembang dan akan hancur secara perlahan. Kepemimpinan itu sendiri diperlukan dalam setiap organisasi ataupun dalam setiap kelompok.

Desa merupakan kumpulan masyarakat dimana masyarakat tersebut memiliki kedaulatan dan memiliki peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa dipimpin oleh kepala desa yang mana dipilih dari rakyat dan



oleh rakyat. Kepala desa menjadi penentu dari kemajuan suatu desa, karena kepala desa merupakan titik pusat proses atau menjadi tingkat tertinggi di dalam desa. Sehingga kemajuan desa tergantung pada kepemimpinan kepala desa itu sendiri.

Pancasila merupakan ideologi bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur didalamnya dimana jika pancasila diamalkan dengan sepenuhnya oleh seluruh individu maka akan menjadikan negara Indonesia menjadi berkualitas. Pancasila juga dapat dijadikan pedoman untuk memimpin karena didalamnya terdapat suatu nilai-nilai yang harus diamalkan oleh seorang pemimpin.

Kepemimpinan yang berbasis Pancasila, semuanya berlandaskan pada sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Seperti halnya sila pertama, seorang pemimpin harus percaya dan harus berpedoman pada perintah Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, seorang pemimpin harus memandang bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sila ketiga, seorang pemimpin harus dapat menjadi pemersatu bangsa, karena perbedaan suku bangsa maka seorang pemimpin harus dapat menyatukan perbedaan yang berada dalam kehidupan sosial masyarakat.

Sila keempat, setiap pemimpin harus menjalankan musyawarah untuk pengambilan keputusan dan melibatkan semua kalangan baik itu masyarakat ataupun pembantu pemimpin. Terakhir sila kelima, seorang pemimpin harus bertindak adil tidak menitik beratkan pada satu golongan saja serta seorang pemimpin harus dapat mewujudkan kesejahteraan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.

Hak atas tanah atau sertifikasi tanah merupakan hak yang dimiliki individu atas sebidang tanah, yang mana tanah yang dimiliki kuat secara hukum apabila sudah mendapatkan sertifikat atas tanah yang dimiliki.

Penelitian ini menekankan pada kepemimpinan kepala desa, menurut penulis kepemimpinan yang cocok dalam penanganan sertifikasi tanah merupakan kepemimpinan yang berbasis Pancasila. Berdasarkan penjelasan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila di atas, Kartono (2013: 319) melalui sebelas asas nilai-nilai yang berdasarkann bumi Indonesia menyatakan sebagai berikut:

1. Hing Ngarsa Sung Tulada

Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berani menjadi ujung tombak bagi masyarakatnya. Dia harus berani mengabdikan diri kepada kepentingan umum dan kepentingan segenap anggota organisasinya. Sebagai pemimpin yang berdiri didepan ia harus memiliki sifat-sifat teguh, tanggon dan tanggung. Teguh artinya berani menghadapi bahaya karena ia menjadi pengayom, *Tanggon* artinya besar kemauannya dalam menanggulangi bahaya, dan *Tanggung* artinya berani bertanggung jawab walaupun mengalami banyak kesulitan.

2. Hing Madya Mangun Karsa

Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau terjun langsung di tengah-tengah masyarakat. Merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, sanggup menggugah dan membangkitkan gairah serta motivasi kerja. Pemimpin yang seperti ini memiliki kesentosaan hati,

cepat tanggap dalam mengambil keputusan karena ia merasakan apa yang dirasakan bawahannya.

### 3. Tut Wuri Handayani

Seorang pemimpin berdiri di belakang pengikutnya dalam artian seorang pemimpin harus mampu mendorong pengikutnya agar pengikutnya mau berprakasa, berani berinisiatif, dan memiliki kepercayaan diri untuk berkarya dan berpartisipasi dan tidak tergantung pada perintah atasan saja.

### 4. Ketuhanan Yang Maha Esa

Seorang pemimpin, dituntut agar memiliki keyakinan beragama, keimanan, dan ketakwaan yang teguh terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan kepada Tuhan akan membuat kalbu dan hati menjadi bersih dan suci lahir dan batin.

### 5. Waspada Purba Wisesa

Waspada artinya seorang pemimpin harus memiliki pandangan kedepan untuk meramal akan bagaimana keadaan organisasinya, sedang "*murba*" atau purba artinya mampu menguasai, *wasesa* artinya keunggulan, kelebihan. Jadi *purba wasesa* yaitu mampu menciptakan dan mengendalikan semua kelebihan dan kekuasaan. Berdasarkan sifat-sifat unggul tersebut pemimpin harus mampu mengurus setiap persoalan yang berkembang.

#### 6. Ambeg Pramarta

*Ambeg* artinya mempunyai sifat – sifat. *Pramarta* artinya yang benar, yang hakiki. Maka *ambeg pramarta* yaitu murah, baik hati. Seseorang yang memiliki *ambeg pramarta* dalam hidupnya selalu memiliki sikap adil yang mana mendahulukan yang harus didahulukan.

#### 7. Prasaja

Pemimpin bersifat sederhana, terus terang, blak-blakan, tulus, lurus, ikhlas, dan toleran. Pemimpin tidak memiliki sifat gambar gembor selalu terus terang apa adanya.

#### 8. Satya

Pemimpin yang memiliki satya adalah pemimpin yang memiliki kesetiaan, menepati janji, dan selalu memenuhi segala ucapannya. Pemimpin yang memiliki satya biasanya merupakan pemimpin yang jujur dan setia, cermat, tepat dan selalu loyal terhadap kelompoknya. Pemimpin ini selalu memberikan yang terbaik kepada pengikutnya.

#### 9. Gemi Nastiti

Pemimpin harus memiliki sifat hemat cermat, dalam artian seorang pemimpin bekerja dengan efektif dan efisien. Seorang pemimpin yang *gemi nastiti* juga memiliki kesadaran untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran apa saja untuk keperluan yang benar – benar penting.

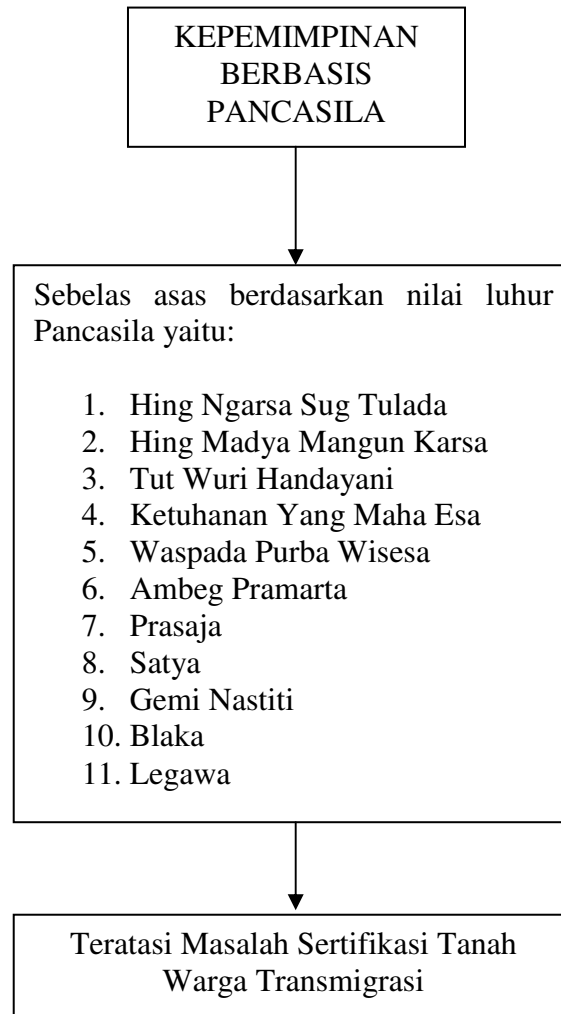
#### 10. Blaka (terbuka, jujur, lurus)

Pemimpin yang baik harus bersifat terbuka, komunikatif, tidak picik pandangan. Pemimpin ini mau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan pendapatnya, kritik atau koreksi. Pemimpin seperti ini tidak boleh malu dalam belajar untuk menyesuaikan lingkungannya. Pemimpin yang baik menyadari bahwa tidak ada kesempurnaan yang dimiliki oleh setiap makhluk oleh karena itu dia membuka diri untuk terus belajar dan melakukan transendensi diri.

#### 11. Legawa

*Legawa* artinya tulus ikhlas, seorang pemimpin berani mengorbankan diri demi pengikutnya. Ketika seorang pemimpin mendapat cemooh dari pihak luar, seorang pemimpin harus mampu menerima dengan ikhlas dan memperbaiki kesalahan yang diungkapkan pengikutnya tanpa merasa sakit hati.

Dengan menggunakan 11 Indikator Asas Kepemimpinan Pancasila diatas, peneliti berkeyakinan bahwa Kepala Desa dapat menyelesaikan masalah mengenai penanganan sertifikat tanah yang dimiliki oleh warga transmigrasi. Warga yang telah memiliki sertifikat diharapkan dapat memiliki sebidang tanah yang diperkuat oleh hukum sehingga tanah yang dimiliki tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain dan masyarakat dapat hidup dengan aman dan tentram.



Gambar 1. Kerangka Pikir